



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Ungaran, 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan salah satu prioritas daerah berupa pementapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta semakin sejahtera dan lestari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Tahun 2024 menjadi tahapan awal dan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target rancangan pembangunan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat sebagaimana hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Selain itu, tahun 2024 menjadi tahun awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah paska berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Untuk DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah program dan kegiatan tahun 2024 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan pengentasan desa rawan pangan dan gizi, kajian *food loss* dan *food waste*, stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis, cadangan pangan pemerintah, lumbung pangan masyarakat, penanganan stunting melalui desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), pemetaan diversifikasi pangan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang memuat prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan beserta pengalokasian pagu indikatif yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Rancangan Renja DISHANPAN disusun dengan mempertimbangkan upaya akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mengutamakan belanja untuk masyarakat, efisiensi dan efektifitas pada belanja pendukung kegiatan serta memastikan *redliness criteria* kegiatan yang akan dilaksanakan. Renja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja, meliputi: 1) Penggalian masalah dan potensi; 2) Pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Verifikasi awal oleh Bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

- Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
 28. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
 37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
 38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Tengah;

43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjabarkan rencana strategis DISHANPAN ke dalam rencana operasional tahun 2024;
- b. Menjaga konsistensi capaian target kinerja program/kegiatan dan standar pelayanan minimal DISHANPAN tahun 2024 dengan Renstra DISHANPAN Tahun 2024-2026.
- c. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pangan.
- d. Menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPS, RAPBD dan APBD tahun 2024.

2 Tujuan

- a. Memberikan landasan operasional dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2024;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024;
- c. Mewujudkan konsistensi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan provinsi tahun 2024 dengan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Bab ini memuat rewiu evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pangan; rewiu terhadap rancangan awal RKPD serta telaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 dan manajemen risiko strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 serta manajemen risiko program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan program Peningkatan Ketahanan Pangan. Berdasarkan matrik pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja outcome dan hasil ke tujuh (7) indikator tercapai melebihi target 100% yaitu: Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas, CV harga pangan strategis (beras), Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan, Angka konsumsi beras, Prosentase penurunan daerah rawan pangan, Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, dan Prosentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan.

Realisasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 mengacu pada APBD 2022 secara terinci dituangkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah serta realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD yang secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 terdiri dari 14 kegiatan, 40 sub kegiatan dan 65 indikator sub kegiatan dengan realisasi kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keselaran proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan serta dilakukannya pemantauan secara rutin menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja hasil/keluaran sesuai target yang telah ditetapkan. Dan adapula beberapa kinerja hasil/keluaran yang dicapai melebihi target, antara lain disebabkan oleh 1). Tingginya kesadaran masyarakat terkait penyimpanan pangan sebagai stok cadangan pangan di masyarakat, 2). Semakin rendahnya konsumsi beras dan beralih ke pangan lokal sehingga kebutuhan beras semakin kecil, 3). Bantuan Pemerintah terkait pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, 4). Adanya program Pemerintah yang mensosialisasikan sumber karbohidrat tidak hanya bersumber dari nasi, tetapi bisa didapatkan dari umbi-umbian dan pangan lokal lainnya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	2	2	2	100	23	23	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang	Dokumen	2	2	2	100	6	6	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang	Dokumen	2	2	2	100	17	17	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	2	2	2	100	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	1	1	1	100	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	20	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	50	25	25	100	74	74	100
		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	10	5	5	100	6	10	166,67
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Laporan	1	1	1	100	1	1	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	3	2	3	150	1	1	100
		Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	2	1	1	100	2	2	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	12	12	100	12	12	100
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas	Kkal/kap/hari	3.732	3.731	3.797	102	4.020	4.021	100,02
		CV harga pangan strategis (beras)	Angka	4,8	4,9	2,14	398	2	0,58	344,83
		Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Angka	0,67	0,61	2,41	395	1	1,03	103
		Angka Konsumsi Beras	Kg/Kap/Th	91,4	92,3	87,9	105	91,4	88,60	103,16
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Kelompok	15	5	5	100	0	0	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan	Laporan	2	2	2	100	2	2	100
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	5	83,56	1.671	100	217,93	217,93
		Presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	5	16,67	333	5	6,25	125
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan	Laporan	2	1	1	100	13	13	100
		Jumlah informasi dan intervensi harga pangan strategis	Kali	5	4	4	100	16	16	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi	Paket	15	5	5	100	0	0	100
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya	Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah	Laporan	1	1	1	100	12	12	100
		Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Paket	1	1	1	100	0	0	0
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan)	Kelompok	35	28	28	100	0	0	0
		Jumlah lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	Lokasi	10	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Presentase peningkatan volume cadangan pangan	%	7	6	8,61	143,51	50	139,16	278,32
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah CPP yang disediakan (beras)	Ton	300	200	186,26	93	370	410,45	110,93
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	35	28	28	100	849	837	98,59
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,15	0,14	0,17	121	0,15	0,19	126,67
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	Kg/Kap/Th	87	86	92,9	108	87	94	108,05
		Konsumsi kelompok pangan hewani	Kg/Kap/Th	34	33	36,3	110	34	35,40	104,12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	Kelompok	40	30	30	100	37	37	100
100		Analisa PPH	Laporan	1	1	1	100	1	1	100
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Kelompok	35	25	25	100	28	28	100
		Jumlah Promosi dan edukasi Pangan B2SA yang	Kali	5	3	4	133	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dilaksanakan								
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	80	80,79	101	80	96,83	121,04%
		Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	%	80	80	90,76	113	80	100	125%
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat level penerapan Higiene Sanitasi	%	10	10	10	100	10	12	120
		Persentase PSAT teregistrasi di peredaran	%	23	65	86,64	133	67	92,26	137,70
		Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang difasilitasi	Laporan	1	1	1	100	1	1	100
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan sertifikasi dan registrasi	Angka	83,5	83	93	112	83,5	80	95,81
		Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	Angka	70	67,5	93,19	138	70	95,63	136,61

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Dokumen	3	2	4	200	3	3	100
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	300	250	300	120	345	463	134,20
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	250	225	225	100	940	1.051	111,81
	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Kelompok	24	20	20	100	25	25	100
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan sertifikasi dan registrasi	Sertifikat	38	35	117	334,29	70	103	147,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sampel pangan yang diuji	Sampel	70	60	605	1.008,33	395	619	156,71
		Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboratorium BPMKP	Paket	1	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	1	58,73	2000	1	52,56	5.256%
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	4,45	4,45	17,99	449	4,91	5,56	113,23

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah desa mandiri pangan yang difasilitasi	Desa	34	30	30	100	34	34	100
		Peta SKPG dan atau FSVA	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Tahun 2018 – 2023. Hasil analisis tertuang pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data Tabel 2.3. dapat dilihat tingkat pencapaian target kinerja DISHANPAN untuk seluruh indikator kinerja program outcome. Hasil evaluasi kinerja pelayanan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan Renja DISHANPAN Tahun 2024.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	
2	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD		100	100	100	100	100	
3	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD		100	100	100	100	100	
4	Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas		3.731	3.731	4.020	3.797	4.021	
5	CV harga pangan strategis (beras)		4,50	4,50	2	1,23	0,58	

6	Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan		0.61 ton	0,61 ton	1 ton	2,41	1,03	
7	Angka Konsumsi Beras		92,30	92,30	91,4	87,9	88,60	
8	Prosentase penurunan daerah rawan pangan		1	1	1	58,7	52,56	
9	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan		80	80	80	86,67	93,78	
10	Prosentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		80	80	80	90,76	100	

Uraian capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Capaian target indikator ini adalah 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 25 (dua puluh lima) sub kegiatan pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 13 (tiga belas) sub kegiatan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 8) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 14) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
 - 15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 16) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 17) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 18) Penataan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 19) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 20) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 21) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 22) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
 - 25) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
- 13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD

Capaian target indikator ini adalah 100% yang dilakukan melalui 2 (dua) sub kegiatan. *Pertama*, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dan tercapai 100%. Dokumen perencanaan yang disusun meliputi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) tahun 2023. *Kedua*, kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dan tercapai 100%. Dokumen evaluasi yang disusun meliputi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

3. CV Harga Pangan Strategis (Beras)

Indikator program koefisien variasi harga di tingkat konsumen (CV) untuk harga pangan strategis (beras) dan target tercapai sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Koefisien variasi harga ditingkat konsumen (CV) merupakan salah satu tolok ukur stabilisasi harga, semakin kecil CV harga pangan maka semakin stabil harga pangan di tingkat konsumen. Capaian CV yang tersaji tabel 2.1. menunjukkan bahwa untuk harga pangan strategis beras relatif stabil. Upaya pencapaian target dilakukan melalui Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Peningkatan Akses Pangan.

Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dengan target kegiatan, yaitu: (i) Jumlah intervensi harga pangan strategis (beras, cabe, bawang merah) terealisasi sebanyak 4 kali.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dilakukan berbagai upaya meliputi koordinasi lintas sektor untuk pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemantauan dan pengumpulan informasi harga, pasokan dan akses pangan di tingkat produsen dan konsumen dilaksanakan secara rutin atau periodik untuk digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan terkait distribusi pangan mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah dan disajikan mingguan/bulanan. Selain itu dilakukan pula intervensi harga pangan komoditas strategis (beras, cabe, dan bawang merah) melalui Bazar Pangan Murah/Gelar Pasar Murah dan menjual komoditas strategis tersebut dengan harga terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kestabilan harga.

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan target kegiatan, yaitu: (i) Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah sebanyak 1 laporan dan telah terealisasi sebesar 100%; (ii) Jumlah TTI Center yang difasilitasi dengan target 1 paket dan telah terealisasi sebesar 100%. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi dengan target kegiatan yaitu Jumlah kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada LDPM sebanyak 28 kelompok dan telah terealisasi sebesar 100%. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dengan memperpendek rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta meningkatkan akses pangan masyarakat pada kondisi tertentu.

4. Ketersediaan Energi dan Protein Pangan Beragam dan Berkualitas

Capaian target ketersediaan energi yaitu 101,77% atau ketersediaan energi mencapai 3.797 kkal/kapita/hari. Sedangkan Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan dan kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan.

Untuk kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan tercapai 100% melalui penyusunan 1 rekomendasi terkait ketersediaan bahan pangan (dalam bentuk energi, protein dan lemak) untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu di wilayah Jawa Tengah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022. NBM disusun setiap tahun yang mengacu pada metode dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada.

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan tercapai 100% yaitu melalui sosialisasi kegiatan pengembangan komoditas tanaman unggulan porang terhadap 5 paket bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi untuk

mendukung peningkatan ketersediaan energi dan diversifikasi pangan di Provinsi Jawa Tengah.

5. Angka Konsumsi Beras

Indikator program konsumsi beras dengan target sebesar 92,30 kg/kapita/tahun. Konsumsi beras selama tahun 2022 sebesar 87,90 kg/kapita/tahun dengan pencapaian target sebesar 105,01%. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi konsumsi beras, diimbangi dengan peningkatan konsumsi kelompok pangan lainnya.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Target kinerja, yaitu: (i) jumlah Promosi Pangan B2SA sebanyak 3 kali dapat tercapai sebanyak 4 kali sehingga pencapaian target sebesar 133% dan (ii) jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan difasilitasi sebanyak 25 kelompok dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui promosi edukasi pangan B2SA, berupa edukasi gerakan konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 9 kali dan lomba kreasi olahan pangan lokal tingkat provinsi dan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal serta pemberian bantuan fasilitasi alat pengolah pangan lokal.

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan target kegiatan, yaitu: (i) Kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang difasilitasi sebanyak 30 kelompok dan telah tercapai 100%; dan 1 laporan analisa PPH yang telah tercapai 100%. Kelompok yang difasilitasi berupa pemberian benih/bibit tanaman, benih/bibit ikan beserta sarana dan prasarana pengembangan bertujuan agar anggota kelompok dan masyarakat sekitar dapat mengurangi pengeluaran belanja serta sumber pendapatan untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan pekarangan warga.

6. Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan

Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dengan target sebesar 0,61 tercapai target sebesar 395,08%. Capaian rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 0,61 yang dihitung dari jumlah stok cadangan pangan masyarakat dibagi kebutuhan cadangan pangan untuk 3 (tiga) bulan.

Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui sub kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan target, yaitu (i) jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi sebanyak 28 kelompok dan telah tercapai 100% dan (ii) jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP) yang disediakan (beras) sebanyak 200 Ton dan telah tercapai sebesar 93%.

7. Persentase penanganan kerawanan pangan

Indikator program persentase penurunan daerah rawan pangan dengan target sebesar 1%, realisasi sebesar 58,73% atau telah tertanganinya 111 kecamatan rawan pangan di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 terdapat 189 kecamatan rawan pangan, sehingga pada tahun 2022 tersisa 78 kecamatan rawan pangan yang masuk dalam Prioritas 1, 2 dan 3.

Upaya pencapaian target tersebut yaitu melalui kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi dengan target kinerja sebesar 4,45% dan telah tercapai sebesar 17,99%. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi melalui Peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebanyak 1 peta dan telah tercapai 100% serta upaya untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program Desa Mandiri Pangan yaitu dengan pemberian stimulan ternak ayam kampung unggulan kepada 30 kelompok afinitas di 20 kabupaten dan telah tercapai 100%.

8. Persentase pengawasan keamanan pangan segar

Indikator program pengawasan keamanan pangan segar dengan target 80% telah tercapai sebesar 80,79%. Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh pengawas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017) serta melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan di sepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Melalui JKPD langkah semua *stakeholder* dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja kegiatan, yaitu (i) Jumlah sampel pangan segar yang aman yang diawasi (Kualitatif) sebanyak 250 sampel tercapai sebanyak 300 sampel (120%) dan (ii) Jumlah laporan kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar sebanyak 2 dokumen tercapai sebanyak 4 dokumen (200%) dan (iii) Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan sebanyak 225 orang tercapai sebesar 100%, yang dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan peserta meliputi perwakilan dari Tim Penggerak PKK, Taruna Tani, KWT, guru, gapoktan yang diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang

pangan yang aman dan bermutu melalui kegiatan ini, serta sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi dengan target kinerja jumlah kelompok yang dibina dalam pengembangan kelembagaan keamanan pangan sebanyak 20 kelompok tercapai sebanyak 20 kelompok (100%).

9. Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan

Indikator program presentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan dengan target sebesar 80% telah tercapai sebesar 90,76% melalui sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan target kinerja jumlah sampel pangan yang diuji sebanyak 60 sampel dan telah terealisasi 605 sampel. DISHANPAN melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah dilakukan sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2022, OKKP-D melalui sub kegiatan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota telah menerbitkan 117 sertifikat yang terdiri dari sertifikat registrasi PSAT, sertifikat Prima 3, registrasi rumah kemas, *health certificate* (HC) dan surat keterangan level penerapan sanitasi hygiene (SKLPSH).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016, dan diubah dengan Pergub Jateng No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016. DISHANPAN mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, DISHANPAN mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antarwaktu dan antarwilayah;
2. Alur distribusi pangan belum efisien;
3. Penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam berbasis sumber daya pangan lokal;
4. Beragamnya jenis komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan luasnya jangkauan wilayah pengawasan PSAT;
5. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMKP dalam mendeteksi mutu dan keamanan PSAT yang beredar di masyarakat;

6. Kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana tidak terduga yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Kerawanan Pangan

Pangan sejatinya merupakan kebutuhan dasar bagi manusia didunia ini tidak luput juga di Indonesia. Menarik benang merah dari Ketahanan pangan, dalam hal aspek penentu utamanya adalah ketersediaan pangan. Tercapainya ketersediaan pangan dalam hal kualitas dan kuantitasnya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan karena dapat mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat.

Ketersediaan pangan beras di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 pada estimasinya telah mencapai surplus kebutuhan beras, yaitu dari ketersediaan sebanyak 6.698.992 ton dengan kebutuhan hanya sebesar 3.231.669 ton. Tapi dalam prakteknya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan pangan dinilai masih kurang pada daerah-daerah tertentu. Hal tersebut terbukti pada peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Tahun 2021 terdapat sebanyak 31 Kecamatan Prioritas 1, 51 Kecamatan Prioritas 2, dan 107 Kecamatan Prioritas ke 3. Terdapat beberapa aspek yang menjadi indikator penyusunan Peta FSVA, yaitu:

- I. Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi kronis yang terbagi dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek ketersediaan pangan yang di turunkan lagi dalam butir-butir aspek yaitu:
 - a. Rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih “beras+jagung+ubi jalar+ubi kayu”.
- 2) Aspek akses terhadap pangan:
 - a. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;
 - b. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran;
 - c. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- 3) Aspek pemanfaatan pangan:
 - a. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun;
 - b. Persentase rumah tangga akses ke air bersih;
 - c. Rasio jumlah penduduk pertenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk;
 - d. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (*Stunting*);
 - e. Persentase angka kesakitan.

- II. Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien (mendadak):

- 1) Bencana alam yang terkait iklim;
- 2) Variabilitas curah hujan;
- 3) Kehilangan produksi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah perlu hadir dalam

memberikan solusi penanganan Kerawanan pangan pada Provinsi Jawa Tengah dengan Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang akan menggunakan data-data strategis sebagai acuan penentuan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) dengan menggunakan irisan antara Peta FSVA dan data DTKS, sehingga diharapkan untuk bisa mengintervensi desa-desa dengan kondisi rawan pangan dan desa yang berada dalam garis kemiskinan ekstrim khususnya di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah penanganan kerawanan pangan.

2. Ketersediaan Pangan

Produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif, namun tidak semua pangan tersedia secara cukup dari hasil produksi di Provinsi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan seperti pada komoditas kedelai mengakibatkan kebutuhan kedelai dan produk turunannya sampai saat ini masih harus dipenuhi dari impor.

Surplus ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah melebihi jumlah kebutuhan beras masyarakat Jawa Tengah, namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, karena pola tanam padi yang sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca, sehingga diperlukan pengelolaan stok beras agar pemenuhan kebutuhan beras dapat tercukupi sepanjang tahun.

Ketersediaan pangan berkaitan erat dengan lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, yang dalam lima tahun terakhir luas lahan pertanian di Jawa Tengah mengalami penyusutan. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi dengan upaya pengembangan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial, sehingga perlu dilakukan kajian terkait alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Tengah sebagai pengawasan dan pemantauan agar tidak terjadi alih fungsi serta wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan melalui pengembangan bahan pangan unggul lokal.

3. Cadangan Pangan

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Keberadaan cadangan pangan ini dirasa cukup vital dalam mewujudkan kedaulatan pangan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan cadangan pangan ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi secara terduga dan tidak terduga dengan lebih matang.

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gunung meletus dan lain sebagainya, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Dengan adanya cadangan pangan diharapkan mampu mereduksi kelangkaan pangan yang terjadi di masyarakat.

4. Distribusi dan Sistem Logistik Daerah

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) kenaikan harga pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*Volatile Foods*) karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik maupun internasional dan kondisi alam. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan yang bisa menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Salah satunya

adalah kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan yang mencakup intervensi harga yang perlu dilakukan guna mengatasi kelangkaan pangan, gangguan terhadap akses pangan serta gejolak harga pangan yang bisa terjadi karena faktor-faktor tersebut.

Belum tersedianya fasilitas serta sarana yang mendukung distribusi pangan, dikhawatirkan akan mengganggu akses fisik yang dapat memicu serangkaian kendala dilapangan. Seperti terjadinya kesenjangan harga pangan antar daerah dan mengganggu kestabilan harga pangan di masyarakat khususnya Provinsi Jawa Tengah. Mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang begitu vital dalam proses distribusi pangan, maka perlu adanya pemenuhan sarana dan prasarana dengan melihat kesesuaian kualitas dan kuantitasnya.

5. Konsumsi Pangan Masyarakat

Sampai saat ini pola konsumsi pangan masyarakat masih cenderung rendah karena kurangnya keberagaman jenis pangan dan keseimbangan gizinya. Hal ini ditunjukkan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Komoditas beras pada kenyataannya masih menjadi primadona dimasyarakat untuk urusan konsumsi sedangkan untuk konsumsi pangan sayur, buah, umbi-umbian kacang-kacangan serta protein hewani masih cukup rendah.

Hal ini tidak lepas dari keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pangan dan gizi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dan maraknya industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang pelaksanaannya tidak membedakan jenis kelamin dan berbasis keadilan bagi seluruh masyarakat diwilayah tersebut.

6. Keamanan Pangan Segar

Pangan Seagar Asal Tumbuhan (PSAT) merupakan pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan atau penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

Keamanan pangan merupakan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mencegah pangan dari kemungkinan tercemar secara biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dewasa ini banyak beredar kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar yang perlu ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar sehingga diperlukan upaya untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

7. Jaminan Mutu dan Keamanan PSAT

Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di

masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 2, Prima 3, Rumas Kemas dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah dilakukan sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

8. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan.

9. *Food Waste* dan *Food loss*

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, food waste atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyiapan di rumah tangga. Food loss dan food waste Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, food loss dan food waste Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg per kapita pertahun yang harusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

Peningkatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Perubahan Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami musim kering berkepanjangan, banjir pada lahan pertanian dan sebagainya. Penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi berupa tindakan pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis secara tepat dan cepat. Rawan pangan kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan rawan transien memerlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera.

3. Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Situasi perekonomian global salah satunya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pangan sehingga berdampak terhadap ketahanan pangan global yang dapat berimbas kepada ketahanan pangan daerah. Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan.

Selain perekonomian global, ketahanan pangan Jawa Tengah juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Pemberlakuan pasar bebas memberikan peluang bagi produk pangan Jawa Tengah untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Sebaliknya, penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia. Peningkatan daya saing produk pangan domestik dan penguatan kapasitas sumberdaya pangan sangat diperlukan menghadapi pasar bebas.

4. Permasalahan Gizi

Peningkatan pendapatan terutama pada masyarakat perkotaan (*urban*) telah mengubah pada gaya hidup terutama pola makan. Telah terjadi perubahan konsumsi dari tinggi karbohidrat kompleks, tinggi serat dan rendah lemak menjadi karbohidrat sederhana, rendah serat dan tinggi lemak. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Selain diet yang tidak seimbang, aktivitas fisik rendah juga menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan *overweight* dan obesitas.

Kekurangan gizipun merupakan salah satu permasalahan gizi terbanyak di Indonesia. Banyak anak balita yang masuk ke dalam masyarakat rentan gizi atau di sebut dengan Stunting. Stunting adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi.

5. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan pada Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar Jawa Tengah akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

6. Jaminan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Diterbitkannya Permentan No. 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan DISHANPAN melalui OKKP-D dan Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

Beberapa peluang yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan urusan pangan, yaitu:

1. Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan guna mendukung perwujudan kemandirian dan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan olahan lokal.

3. Potensi lembaga pertanian masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi suatu badan usaha yang memiliki daya saing kuat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam yang dapat dikembangkan pada lahan pekarangan yang tidak produktif untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman.
5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejak awal ditetapkannya Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan dibandingkan Analisis Kebutuhan yang pementapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta semakin sejahtera dan lestari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana karena pada tahun 2024 merupakan tahun pertama dari Rancangan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 membutuhkan penyesuaian target dan anggaran pada beberapa kegiatan sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Provinsi Jawa Tengah	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (kg/kapita/tahun)	87,8	900.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANG AN MASYARAKAT	Provinsi Jawa Tengah	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) (kg/kapita/tahun)	87,8	900.000
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (kg/kapita/tahun)	87,8	2.100.000			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (kg/kapita/tahun)	87,8	2.100.000
			Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (%)	60	4.070.000			Persentase Komoditas Pangan Strategis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (%)	60	4.070.000
			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	0,62	337.000			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	0,62	337.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat	0,62	307.150			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat	0,62	307.150
			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,064	1.516.785			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,064	1.516.785
			Rata – Rata Ketercukupan Pangan	1,25	200.000			Rata – Rata Ketercukupan Pangan	1,25	200.000
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PPH Kab/Kota > 87 (DRP)	33	900.000	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		PPH Kab/Kota > 87 (DRP)	33	900.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			PPH Kab / Kota > 87		1.100.000			PPH Kab / Kota > 87		1.100.000
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (DMP) (%)	20	337.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (DMP) (%)	20	337.000
			Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (%)	20	307.150			Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (%)	20	307.150
			Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (%)	3	1.516.785			Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (%)	3	1.516.785
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun (dokumen)	1	1.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi		Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun (dokumen)	1	1.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
			Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (%)	20	420.000			Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (%)	20	420.000
			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga (%)	5	2.500.000			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga (%)	5	2.500.000
			Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (%)	100	1.150.000			Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP (%)	100	1.150.000
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (dokumen)	1	200.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan (dokumen)	1	200.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan (%)	80	1.450.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan yang diterbitkan (%)	80	1.450.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu (%)	80	1.365.000			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu (%)	80	1.365.000
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	325.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	350.000
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	400.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun (dokumen)	1	400.000
			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran (%)	65	75.000			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran (%)	65	75.000
			Persentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya (%)	15	565.000			Persentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya (%)	15	565.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi (%)	0,01	3.980.500	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi (%)	0,01	3.980.500
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi (%)	5	3.980.500	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi (%)	5	3.980.500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat (%)	100	804.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat (%)	100	804.000
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (%)	100	1.212.000			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP (%)	100	1.212.000
			Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	22.126.048			Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	22.178.828
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (%)	100	804.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan (%)	100	804.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	17.314.697	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	3	17.314.697
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)	2	140.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (dokumen)	2	140.000
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP (dokumen)	1	40.000			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP (dokumen)	1	40.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (laporan)	1	10.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (laporan)	1	10.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (%)	100	240.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan (%)	100	292.780

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (%)	100	1.251.851	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan (%)	100	1.251.851
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (%)	100	196.000			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP (%)	100	196.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	20	263.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (unit)	20	263.500
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP (unit)	5	290.000			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP (unit)	5	290.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (laporan)	36	1.076.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun (laporan)	36	1.076.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (laporan)	36	330.000			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP (laporan)	36	330.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (unit)	76	1.830.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (unit)	76	1.830.000
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (unit)	12	356.000			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP (unit)	12	356.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu dasar penetapan alokasi kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, adalah usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan usulan sektoral pangan dari kabupaten/kota.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Rawan Pangan yang difasilitasi/Dibina	10 Kelompok	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Dikelola	85 Ton	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Jumlah Desa B2SA di Daerah Rawan Pangan yang Difasilitasi	12 Kelompok	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat/ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Kelompok/Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal yang Difasilitasi	25 Kelompok	
3	Penanganan Kerawanan Pangan/Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah desa stunting yang diintervensi	15 Desa	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi yang Difasilitasi	22 Desa	
			Tersusunnya Dokumen Manajemen <i>Food Loss</i> Dan Atau <i>Food Waste</i>	1 Dokumen	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan/Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah		Jumlah Dokumen Sertifikat Dan/Atau Registrasi Yang Diterbitkan	35 Dokumen	
			Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	100 Sampel	
			Jumlah Masyarakat yang Teredukasi tentang Mutu dan Keamanan Pangan	200 Orang	
			Jumlah Sampel Pangan Segar yang Diawasi	200 Sampel	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina dalam Penerapan Higiene Sanitasi	18 Kelompok	
			Jumlah Kelompok Yang Didampingi Dalam Penyusunan Doksistu	7 Kelompok	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Tema RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” untuk menuju Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pembangunan Nasional diarahkan pada: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi. Penyusunan program dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *money follow program*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, yaitu meningkatnya keterjangkauan/akses pangan dengan indikator sasaran prosentase penanganan kecamatan rawan pangan dan rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras), meningkatnya pemanfaatan pangan dengan indikator sasaran Skor PPH Provinsi, meningkatkan ketersediaan pangan dengan indikator sasaran angka kecukupan energi, meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah dengan indikator sasaran indeks manajemen risiko (IMR). Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Urusan Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83
		Meningkatkan Keterjangkauan/Akses Pangan	Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
			Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	10
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	94.5
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita/hari	3.797
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	5

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TUJUAN								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejala ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2024-2026
SASARAN								
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026
Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penanganan Daerah Rawan dan Gizi	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2024-2026
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kurangnya intervensi pemerintah terhadap pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Edukasi pangan B2SA di semua elemen masyarakat melalui multi media	Kepala Dinas	2024-2026
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pemerintah bidang pangan) dengan total Pagu Anggaran Indikatif Tahun 2024 sebesar Rp 40.421.263.000,-. Program yang dimaksud adalah:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 9.430.935.000,-
 - b. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 2.815.000.000,-.
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp 3.980.500.000,-.
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 24.194.828.000,-.
- Rincian kegiatan untuk masing-masing program diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	
												2024		2025			
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													22.648.885.000		23.112.296.000	Dinas Ketahanan Pangan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82			83	Dinas Ketahanan Pangan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											24.194.828.000		22.212.296.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	82	24.194.828.000		83	22.212.296.000	Dinas Ketahanan Pangan
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											22.178.828.000	22.212.296.000
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	22.178.828.000		100	21.362.000.000	SEKRETARIAT
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									17.314.697.000	17.750.000.000
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	3	17.314.697.000		3	17.750.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.544.697.000			16.900.000.000	
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	93	16.544.697.000		93	16.900.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				370.000.000			400.000.000	
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	370.000.000		12	400.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.003					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				400.000.000			450.000.000	
										Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	12	400.000.000		12	450.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									140.000.000	150.000.000
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	2	140.000.000		2	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.03.002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				120.000.000			130.000.000	
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	2	120.000.000		2	130.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.03.006					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000			20.000.000	
										Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	4	20.000.000		4	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000			10.000.000	
								Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat			Laporan	1	10.000.000		1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.04.005					Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000			10.000.000	
										Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	10.000.000		4	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						292.780.000			240.000.000	
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	292.780.000		100	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				52.780.000		-	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
										Jumlah Paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	Paket	1	52.780.000		-	-	
				X.XX.01.1.05.003					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				240.000.000			240.000.000	
										Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	240.000.000		12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.251.851.000			1.250.000.000	
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	1.251.851.000		100	1.250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				104.351.000			100.000.000	
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	104.351.000		12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2024		2025		
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				X.XX.01.1.06.004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				112.500.000		150.000.000	
				X.XX.01.1.06.005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	112.500.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	100.000.000	12	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.008					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0	-	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.009					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	620.000.000	12	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	1	20.000.000	1	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						263.500.000		200.000.000	
				X.XX.01.1.07.010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	195.000.000	12	185.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.076.000.000		1.182.000.000	
				X.XX.01.1.08.001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	1.076.000.000	36	1.182.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08.002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	300.000.000	12	400.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08.004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	770.000.000	12	770.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.830.000.000		580.000.000	
				X.XX.01.1.09.002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	76	1.830.000.000	65	580.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09.009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan naikannya	Unit	24	250.000.000	24	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09.010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	1.500.000.000	1	250.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09.010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000		80.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2024		2025		
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	40	80.000.000	40	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP					%	100	1.212.000.000	100	850.296.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000		40.000.000	
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP			Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.03.002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000		40.000.000	
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	40.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.000.000		274.296.000	
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP			%	100	196.000.000	100	274.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000	
				X.XX.01.1.06.004						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.005					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				101.000.000		174.296.000	
				X.XX.01.1.06.006						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	101.000.000	12	174.296.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.008					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000	
				X.XX.01.1.06.009						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.010					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-		5.000.000	
				X.XX.01.1.06.011						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Laporan	0	-	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						290.000.000		100.000.000	
				X.XX.01.1.07.010						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan pada BPMKP	Unit	5	290.000.000	2	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.000.000		296.000.000	
				X.XX.01.1.08.001						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Laporan	36	330.000.000	36	296.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.002					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		6.000.000	
				X.XX.01.1.08.003						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	0	-	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.004					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.000.000		140.000.000	
				X.XX.01.1.08.005						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	180.000.000	12	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.006					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		150.000.000	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Unit	12	356.000.000	11	140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah		
												2024		2025				
												Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				X.XX.01.1.09.009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					306.000.000		100.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	306.000.000	1	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.09.010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Baneunan Lainnya					50.000.000		40.000.000		
										Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	10	50.000.000	10	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah												804.000.000		900.000.000		
			Indeks Manajemen Risiko								Angka	5	804.000.000	4	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									804.000.000		900.000.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	100	804.000.000	100	900.000.000	SEKRETARIAT		
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							804.000.000		900.000.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100	804.000.000	100	900.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM		
				X.XX.01.1.01.001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					420.000.000		450.000.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	420.000.000	7	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM		
				X.XX.01.1.01.007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					384.000.000		450.000.000		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	18	384.000.000	18	450.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM		
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)														6.093.935.000		10.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	
	Indeks Ketahanan Pangan										Skor	83	6.093.935.000	83.05	10.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan												4.070.000.000		3.580.000.000		
			Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)								%	10	4.070.000.000	10	3.580.000.000	Dinas Ketahanan Pangan		
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									4.070.000.000		3.580.000.000		
														4.070.000.000		3.580.000.000		
														4.070.000.000		3.580.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							4.070.000.000		3.580.000.000		
														4.070.000.000		3.580.000.000		
														4.070.000.000		3.580.000.000		
				2.09.03.1.01.003					PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT					420.000.000		450.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	
														420.000.000		450.000.000		
				2.09.03.1.01.003					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					420.000.000		450.000.000		
														420.000.000		450.000.000		
										LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	Kelompok	10	420.000.000	10	450.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN		
														420.000.000		450.000.000		
														420.000.000		450.000.000		
										PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA				2.500.000.000		2.130.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	
														2.500.000.000		2.130.000.000		
				2.09.03.1.01.003					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					2.500.000.000		2.130.000.000		
														2.500.000.000		2.130.000.000		
														2.500.000.000		2.130.000.000		
										JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	Dokumen	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN		
														1.500.000.000		1.500.000.000		
										VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	Ton	550	1.000.000.000	350	630.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN		
														1.000.000.000		630.000.000		
										PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP				100	1.150.000.000	100	1.000.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2024		2025		
												Target (13)	Rp (14)	Target (15)	Rp (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				2.09.03.1.01.0009					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				1.150.000.000		1.000.000.000	
									JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	Dokumen	12	150.000.000	12	200.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	
									JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	Paket	3	1.000.000.000	3	800.000.000	Sub Koordinator STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan											2.023.935.000		3.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Angka Kecukupan Energi								kcal/kapita/hari	3797	2.023.935.000	3.801	3.900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								2.023.935.000		3.900.000.000	
						Rasio cadangan pangan masyarakat					Angka	0,62	307.150.000	0,63	350.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							307.150.000		350.000.000	
								PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT			%	20	307.150.000	20	350.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.02.0005				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					307.150.000		350.000.000	
						Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi					Angka	0,06	1.516.785.000	0,068	3.200.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							1.516.785.000		3.200.000.000	
								PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI			%	3	1.516.785.000	3	3.200.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
				2.09.03.1.02.0005				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					1.516.785.000		3.200.000.000	
									LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	307.150.000	28	350.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	
											Angka	0,06	1.516.785.000	0,068	3.200.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							1.516.785.000		3.200.000.000	
													1.516.785.000		3.200.000.000	
				2.09.03.1.02.0005				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					1.516.785.000		3.200.000.000	
									JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	Ton	85	1.516.785.000	233	3.200.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	
						Rata-rata kecukupan pangan					Angka	1,25	200.000.000	1,25	350.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							200.000.000		350.000.000	
									JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	Dokumen	1	200.000.000	1	350.000.000	Sub Koordinator KETERSEDIAAN PANGAN	
				2.09.03.1.01.0013				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					200.000.000		350.000.000	
													200.000.000		350.000.000	
													200.000.000		350.000.000	
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)													10.182.500.000		10.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Ketahanan Pangan										Skor	83	10.182.500.000	83,05	10.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan											5.217.500.000		5.250.000.000	
			Persentase penanganan kecamatan rawan pangan								%	5	5.217.500.000	6	5.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1.237.000.000		1.200.000.000	
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)					kg/kapita/tahun	87,8	900.000.000	87,7	850.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengembangan Konsumsi Pangan
				2.09.03.1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi							900.000.000		850.000.000	
								PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)			Angka	33	900.000.000	34	850.000.000	Sub Koordinator PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN B2SA
				2.09.03.1.04.0002				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					900.000.000		850.000.000	
									JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	Desa	12	900.000.000	22	850.000.000	Sub Koordinator PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN B2SA	
						Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)					Angka	0,62	337.000.000	0,63	350.000.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							337.000.000		350.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2024		2025		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				2.09.03.1.02.0005				PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)			%	20	337.000.000	20	350.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
									Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				337.000.000		350.000.000	
				2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					LUMBUH PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA	Kelompok	10	337.000.000	10	350.000.000	Sub Koordinator DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
						Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi					%	0,01	3.980.500.000	0	4.050.000.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
				2.09.04.1.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						3.980.500.000		4.050.000.000	
								PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI			%	5	3.980.500.000	5,5	4.050.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
				2.09.04.1.02.0004					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				3.980.500.000		4.050.000.000	
										JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	Desa	22	2.467.500.000	22	2.500.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSII	Desa	15	750.000.000	15	750.000.000	Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	Dokumen	1	40.000.000	1	750.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	Dokumen	1	40.000.000	1	150.000.000	Sub Koordinator KERAWANAN PANGAN
										TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	Dokumen	1	421.000.000	1	500.000.000	Sub Koordinator KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
													262.000.000	1	75.000.000	Sub Koordinator PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
													4.965.000.000		4.875.000.000	
													4.915.000.000	94,6	4.875.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								2.100.000.000		1.900.000.000	
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah					kg/kapita/tahun	87,8	2.100.000.000	87,7	1.900.000.000	Bidang Pengendalian Konsumsi Pangan
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1.000.000.000		800.000.000	
								REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN			Dokumen	1	1.000.000.000	1	800.000.000	Sub Koordinator PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
				2.09.03.1.01.0002					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.000.000.000		800.000.000	
										JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	Kelompok	25	1.000.000.000	25	800.000.000	Sub Koordinator PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
				2.09.03.1.04			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						1.100.000.000		1.100.000.000	
									PPH Kab / Kota > 87		Angka	33	1.100.000.000	34	1.100.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
				2.09.03.1.04.0001					Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				800.000.000		800.000.000	
										Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	10	450.000.000	10	450.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
										Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	2500	350.000.000	2500	350.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
				2.09.03.1.04.0002					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				300.000.000		300.000.000	
										JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	Desa	3	250.000.000	5	250.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
										JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	Sub Koordinator PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah
												2024		2025		
												Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								2.815.000.000		2.975.000.000	
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan					%	80	1.365.000.000	82	1.525.000.000	Bidang Keamanan Pangan
				2.09.05.1.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.365.000.000		1.525.000.000	
								JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*			Dokumen	1	325.000.000	1	380.000.000	Sub Koordinator KERJASAMA DAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				325.000.000		380.000.000	
										JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Orang	200	325.000.000	250	380.000.000	Sub Koordinator KERJASAMA DAN KEAMANAN PANGAN
								JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**			Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				400.000.000		400.000.000	
										JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	sampel	200	400.000.000	250	400.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
								Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran			%	65	75.000.000	67	150.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				75.000.000		150.000.000	
										JUMLAH LOKASI PENGAWASAN LJIN EDAR	Lokasi	40	75.000.000	50	150.000.000	Sub Koordinator PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
								PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA			%	15	565.000.000	20	595.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0009					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				565.000.000		595.000.000	
										Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksisitu	Kelompok	7	275.200.000	4	120.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
										JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	Kelompok	18	289.800.000	22	475.000.000	Sub Koordinator KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
						Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan					%	80	1.450.000.000	80	1.450.000.000	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
				2.09.05.1.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.450.000.000		1.450.000.000	
								Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai			Dokumen	2	1.450.000.000	2	1.450.000.000	Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0006					Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				800.000.000		800.000.000	
										Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	35	800.000.000	35	800.000.000	Sub Koordinator SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
				2.09.05.1.01.0010					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				650.000.000		650.000.000	
										Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	sampel	100	650.000.000	90	650.000.000	Sub Koordinator PENGUJIAN PANGAN
JUMLAH													40.421.263.000		41.567.592.000	

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (***risk appetite***). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (***risk register***), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (pernyataan risiko, skala risiko, penyebab risiko, dampak risiko, rencana tindak lanjut atas risiko, pemilik risiko dan target waktu penyelesaian) yang tertuang pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	20	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Pengembangan pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2024
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	20	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Pengembangan pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2024
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	8	Keterbatasan anggaran. SDM pengelola cadangan pangan masyarakat, dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	2024
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	8	Keterbatasan anggaran. SDM pengelola cadangan pangan masyarakat, dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	2024
	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat rawan pangan	16	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	6	Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	kerjasama pelaku usaha olahan pangan lokal sesuai kebutuhan	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	2024
	Persentase Komoditas Pangan Startegis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	8	Memasuki masa panen bulan Februari s.d. April petani mengalami puso dikarenakan bencana alam	Permintaannya banyak, produksi sedikit, sehingga harga menjadi mahal dan beras Jawa Tengah banyak yang ke luar daerah.	Optimalisasi penyerapan beras di Jawa Tengah melalui BUMN/BUMD Pangan.	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan	2024
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	16	Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan B2SA belum tersosialisasi secara optimal	Masih terdapat Kabupaten dengan PPH dibawah 87	Pelaksanaan Edukasi dan Promosi B2SA kepada masyarakat dengan menyesuaikan permasalahan di lapangan	Seksi Konsumsi Pangan	2024
	PPH Kab / Kota > 87	Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	16	Kurangnya pengenalan olahan pangan lokal kepada masyarakat	masih minimnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan makanan sehari-hari	Pelaksanaan Promosi B2SA berbasis pangan lokal kepada masyarakat	Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2024
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	16	Definisi Pangan lokal di Jawa Tengah masih terlalu luas dan kurang fokus	Strategi intervensi pengembangan pangan lokal tidak mendasarkan pada Pemetaan potensi pangan lokal	Perumusan defini operasional pangan lokal Jawa Tengah	Seksi Pengembangan Pangan Lokal	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Lembaga usaha pangan tidak berjalan optimal	6	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan; Kurangnya modal sehingga kalah bersaing dengan swasta besar	Usaha kelompok tidak berkembang optimal	Sinergitas dengan kabupaten/kota, kerjasama dengan toko mitra sehingga dapat mengoptimalkan pemerataan keterjangkauan bahan pangan	Seksi Distribusi Pangan	2024
	Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Bahan pangan tidak dapat terdistribusi secara merata di sepanjang wilayah	6	Keterbatasan anggaran, panjangnya rantai distribusi pangan, Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif	Pasokan dan harga pangan tidak stabil sepanjang tahun	Seksi Distribusi Pangan	2024
	Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	9	Produksi komoditas pangan bersifat musiman dan sifat komoditas yang mempunyai umur simpan relatif pendek	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Subsidi harga di tingkat produsen maupun konsumen.	Seksi Harga Pangan	2026
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Data dasar penyusunan prognosa neraca pangan kurang akurat	8	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Data kurang dapat menggambarkan kondisi neraca		Seksi Distribusi Pangan	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (Dmp)	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	8	Kurang optimalnya penyediaan cadangan pangan	Keterbatasan penanganan daerah rawan pangan	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Seksi Cadangan Pangan	2024
	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	8	Kurang optimalnya penyediaan cadangan pangan	Keterbatasan penanganan daerah rawan pangan	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Seksi Cadangan Pangan	2024
	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	16	Keterbatasan anggaran dan sarprass, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan di Jawa Tengah.	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Seksi Cadangan Pangan	2024
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.	Surveilan dilakukan berbasis resiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan pangan	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 tahun
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Kemanan Dan Mutu Pangan	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	12	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT, edukasi dan pembinaan	Bidang Keamanan	2026

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Edukasi keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat melalui forum pertemuan serta pemanfaatan media sosial Instagram dan Youtube Dishanpan Jateng	Seksi Kerjasama Dan Informasi Keamanan Pangan	2024
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	6	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi yang disusun	Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	2026
	Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran	Pelanggaran label PSAT	12	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	2026
	Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	12	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak kompeten	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan	2024
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha masih karena regulasi yang mengharuskan	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan jaminan mutu dan keamanan pangan	Hasil registrasi dan uji mutu kurang terjaga dan kontinyu	Survailen terhadap registrasi dan hasil uji mutu yang telah dikeluarkan dari instansi	Seksi Standarisasi Dan Sertifikasi Pangan	2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal.	16	Intervensi hanya berupa stimulus pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain.	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi.	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan.	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	2024-2026
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan	16	Fasilitasi Desa Rawan Pangan baru berupa stimulus pangan dan belum mencakup semua desa rawan pangan	Penanganan desa rawan pangan tidak mampu mengubah skala prioritas yang lebih tinggi.	Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan lintas bidang dan lintas OPD.	Seksi Kerawanan Pangan	2024-2026

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan DISHANPAN yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, Rencana Strategis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026, Hasil Evaluasi Kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 serta penggalan masalah dan potensi-potensi yang ada dengan mendasarkan pada metode pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan salah satu prioritas daerah berupa pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan serta semakin sejahtera dan lestari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana sehingga Rencana Kerja (Renja) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 difokuskan pada kegiatan Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan pengentasan desa rawan pangan dan gizi, kajian *food loss* dan *food waste*, stabilisasi pasokan dan harga pangan, cadangan pangan pemerintah, lumbung pangan masyarakat, penanganan stunting melalui desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), pemetaan diversifikasi pangan lokal serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pengimplementasikan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Tabel 1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	Strategis Pemda	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejolak ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Menurunnya Indeks Reformasi Birokrasi	Operasional OPD	Peraturan/kebijakan baru saat penyusunan RB	Tunjangan Tambahan Pegawai menurun	Dishanpan Prov. Jateng
2	Sasaran Strategis PD	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	Strategis OPD	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Masyarakat Jawa Tengah
		Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
		Penanganan Daerah Rawan dan Gizi	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	Strategis OPD	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	Strategis OPD	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kaulitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Menurunnya Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Operasional OPD	SDM dan Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai	Terhambatnya Pelayanan OPD	Dishanpan Prov. Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Menurunnya Skor Indeks Manajemen Risiko	Operasional OPD	Banyak data yang harus dipenuhi dengan waktu yang terbatas.	Tidak tercapainya target sasaran OPD	Dishanpan Prov. Jateng
3	Program	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	Operasional OPD	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Masyarakat Jawa Tengah
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	Operasional OPD	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Masyarakat Jawa Tengah
			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola cadangan pangan masyarakat dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Masyarakat Jawa Tengah
			Rasio Cadangan Pangan Masyarakat	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola cadangan pangan masyarakat dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Masyarakat Jawa Tengah
			Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi Kebutuhan Masyarakat rawan pangan	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran dan sarprass, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah.	Masyarakat Jawa Tengah
			Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	Operasional OPD	Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
			Persentase Komoditas Pangan Startegis Dengan Harga Efektif Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	Operasional OPD	Memasuki masa panen bulan Februari s.d. April petani mengalami puso dikarenakan bencana alam	Permintaannya banyak, produksi sedikit, sehingga harga menjadi mahal dan beras Jawa Tengah banyak yang ke luar daerah.	Masyarakat Jawa Tengah
4	Kegiatan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	Operasional OPD	Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan B2SA belum tersosialisasi secara optimal	Masih terdapat Kabupaten dengan PPH dibawah 87	Masyarakat Jawa Tengah
			PPH Kab / Kota > 87	Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	Operasional OPD	Kurangnya pengenalan olahan pangan lokal kepada masyarakat	Masih minimnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan makanan sehari-hari	Masyarakat Jawa Tengah
5	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	Operasional OPD	Definisi Pangan lokal di Jawa Tengah masih terlalu luas dan kurang fokus	Strategi intervensi pengembangan pangan lokal tidak mendasarkan pada Pemetaan potensi pangan lokal	Masyarakat Jawa Tengah
			Peningkatan Kapasitas Usaha Pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Lembaga usaha pangan tidak berjalan optimal	Operasional OPD	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan; Kurangnya	Usaha kelompok tidak berkembang optimal	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
						modal sehingga kalah bersaing dengan swasta besar		
			Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan Untuk Stabilisasi Harga	Bahan pangan tidak dapat terdistribusi secara merata di sepanjang wilayah	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran, panjangnya rantai distribusi pangan, Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	Operasional OPD	Produksi komoditas pangan bersifat musiman dan sifat komoditas yang mempunyai umur simpan relatif pendek	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	Data dasar penyusunan prognosa neraca pangan kurang akurat	Operasional OPD	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Data kurang dapat menggambarkan kondisi neraca	Masyarakat Jawa Tengah
6	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (Dmp)	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	Operasional OPD	Kurang optimalnya penyediaan cadangan pangan	Keterbatasan penanganan daerah rawan pangan	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	Operasional OPD	Kurang optimalnya penyediaan cadangan pangan	Keterbatasan penanganan daerah rawan pangan	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran dan sarprass, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan di Jawa Tengah.	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
7	Program	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Operasional OPD	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	Operasional OPD	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
8	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	Operasional OPD	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Operasional OPD	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran	Pelanggaran label PSAT	Operasional OPD	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan	Masyarakat Jawa Tengah
			Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	Operasional OPD	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak kompeten	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha masih rendah	Operasional OPD	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan jaminan mutu dan keamanan pangan	Hasil registrasi dan uji mutu kurang terjaga dan kontinyu	Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
10	Program	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	Operasional OPD	Intervensi hanya berupa stimulus pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi.	Masyarakat Jawa Tengah
11	Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan	Operasional OPD	Fasilitasi Desa Rawan Pangan baru berupa stimulus pangan dan belum mencakup semua desa rawan pangan	Penanganan desa rawan pangan tidak mampu mengubah skala prioritas yang lebih tinggi.	Masyarakat Jawa Tengah
12	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	Penunjang OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Menurunnya tingkat pelayanan umum perangkat daerah	Dishanpan
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	Penunjang OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Menurunnya tingkat pelayanan umum perangkat daerah di BPMKP	Dishanpan
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)	Penunjang OPD	Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target	Menurunnya indeks manajemen risiko	Dishanpan
13	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	1. Tidak sesuai rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan 2. Tidak tercapainya beberapa indikator (tujuan,	Penunjang OPD	1. Waktu penginputan aplikasi penganggaran yang terbatas/singkat 2. Kurang cermat dan pertimbangan dalam penentuan target	1. Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan 2. Menurunnya nilai SAKIP	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
				sasaran, kegiatan dan sub kegiatan)			perangkat daerah	
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data awal pada administrasi keuangan	Penunjang OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Penyajian laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah	Penunjang OPD	Kurang ketelitian dalam inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	Penunjang OPD	Kurang ketelitian dalam inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Tidak akuratnya penyajian data awal pada administrasi pendapatan daerah	Penunjang OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Penyajian laporan pendapatan daerah yang tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Terdapat gangguan layanan administrasi kepegawaian	Penunjang OPD	Peraturan yang berubah saat tahun berjalan dan keterlambatan dalam pengurusan layanan kepegawaian	Teerhambatnya layanan administrasi kepegawaian (KGB, KP, Peta jabatan, TPP, Pensiun dan promosi mutase)	Dishanpan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal	Penunjang OPD	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan	Dishanpan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
							dalam kegiatan kantor sehari hari	
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	Penunjang OPD	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	BPMKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Markup nilai kontrak peralatan dan mesin lainnya	Penunjang OPD	Ada kesepakatan terselubung antara pelaksana dengan penyedia	Kualitas peralatan dan mesin lainnya tidak sesuai dengan kontrak	Dishanpan
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	Pengadaan alat laboratorium tidak disetujui oleh Ketua TKDN/Sekda	Penunjang OPD	Pengadaan alat laboratorium suku cadangnya masih impor	Mengurangi skor akreditasi laboratorium dan mengurangi kualitas/kuantitas pelayanan pengujian	BPMKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	Dishanpan
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran tidak tersedia dengan cukup	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dishanpan
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran tidak tersedia dengan cukup	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	BPMKP

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	4	4	16	Ada	Edukasi, promosi dan pemberian bantuan olahan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	5	4	20	Ada	Edukasi, promosi dan pemberian bantuan olahan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	5	4	20	Ada	Bantuan gabah kering giling	Belum Memadai	5	4	20
Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	2	4	8	Ada	Bantuan gabah kering giling	Belum Memadai	2	4	8
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi Kebutuhan Masyarakat rawan pangan	2	4	8	Ada	Bantuan beras melalui CPPD	Belum Memadai	2	4	8
Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	4	4	16	Ada	Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal	Belum Memadai	4	4	16
Kenaikan harga beras disesuaikan dengan HET yang baru sesuai Perbadan	3	2	6	Ada	Fasilitasi distribusi, subsidi harga	Belum Memadai	3	2	6
Kegiatan									
Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	4	4	16	Ada	Edukasi promosi, dan pengembangan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	4	4	16	Ada	Edukasi promosi, dan pengembangan pangan lokal	Memadai	3	4	12
Kegiatan									
Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	4	4	16	Ada	Pemetaan potensi pangan lokal Jawa Tengah	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lembaga usaha pangan tidak berjalan optimal	3	2	6	Tidak ada	-	-	3	2	6
Bahan pangan tidak dapat terdistribusi secara merata di sepanjang wilayah	2	3	6	Ada	Fasilitasi distribusi	Memadai	2	2	4
Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	3	3	9	Ada	Subsidi harga dan Gerakan pangan murah	Memadai	3	2	6
Data dasar penyusunan prognosa neraca pangan kurang akurat	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait	Belum memadai	2	4	8
Kegiatan									
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	2	4	8	Ada	Pengadaan gabah kering giling dan pangan lokal	Belum memadai	2	4	8
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	2	4	8	Ada	Pengadaan gabah kering giling dan pangan lokal	Belum memadai	2	4	8
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	4	4	16	Ada	Pengadaan gabah kering giling dan pangan lokal	Belum memadai	4	4	16
Program Pengawasan Keamanan Pangan									
Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	3	3	9	Ada	Surveilen dilakukan berbasis risiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	4	3	12	Ada	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Memadai	3	3	9
Kegiatan									
Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	3	3	9	Ada	Sosialisasi Edukasi dengan bekerjasama dengan TP PKK tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan diharapkan ditindaklanjuti dan diteruskan ke level yang lebih luas	Memadai	3	3	9
Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	3	3	9	Ada	Pembinaan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi	Memadai	3	3	9
Pelanggaran label PSAT	3	4	12	Ada	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Memadai	3	3	9
Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	3	4	12	Ada	Sosialisasi Keamanan Pangan PSAT bagi pelaku usaha	Memadai	3	3	9
Masih Rendahnya Pengajuan Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah	4	2	8	Ada	Laporan rutin administrasi barang milik daerah	Memadai	2	2	4
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	4	2	8	Ada	Laporan rutin administrasi barang milik daerah BPMKP	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data awal pada administrasi pendapatan daerah	3	3	9	Ada	Laporan rutin administrasi pendapatan daerah	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Terdapat gangguan layanan administrasi kepegawaian	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	3	6
Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal di BPMKP	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Instansi terkait	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Markup nilai kontrak peralatan dan mesin lainnya	2	3	6	Ada	Penggunaan Gratis Ongkir dalam setiap pengadaan yang dilakukan	Memadai	2	2	4
Pengadaan alat laboratorium tidak disetujui oleh Ketua TKDN/Sekda	2	3	6	Ada	Mengajukan surat ke Sekda	Memadai	2	2	4
Kegiatan									
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
penunjang urusan pemerintahan daerah					penunjang urusan pemerintahan daerah				
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	3	3	9	Ada	Laporan Rutin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (BPMKP)	Memadai	2	3	6
Kegiatan									
Sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	2	3	6	Ada	Pemeliharaan Rutin	Memadai	2	2	4
Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	2	3	6	Ada	Pemeliharaan Rutin	Memadai	2	2	4

Tabel 3. Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Tujuan				
Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Kepala Dinas	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejala ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat
Sasaran				
Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	16	Kepala Dinas	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Kepala Dinas	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kepala Dinas	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	16	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal
Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	20	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal
Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	20	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola cadangan pangan masyarakat dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri
Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	16	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
				2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai
Kegiatan				
Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	16	Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan B2SA belum tersosialisasi secara optimal	Masih terdapat Kabupaten dengan PPH dibawah 87
Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	16	Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Kurangnya pengenalan olahan pangan lokal kepada masyarakat	masih minimnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan makanan sehari-hari
Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	9	Bidang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Definisi Pangan lokal di Jawa Tengah masih terlalu luas dan kurang fokus	Strategi intervensi pengembangan pangan lokal tidak mendasarkan pada Pemetaan potensi pangan lokal
Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	16	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	Produksi komoditas pangan bersifat musiman dan sifat komoditas yang mempunyai umur simpan relatif pendek	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.
Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	16	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan di Jawa Tengah.
Program Pengawasan Keamanan Pangan				
Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	9	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.
Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	12	Bidang Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu
Kegiatan				
Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	Bidang Keamanan Pangan	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan
Pelanggaran label PSAT	12	Bidang Keamanan Pangan	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	12	Bidang Keamanan Pangan	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak kompeten	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman
Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha masih karena regulasi yang mengharuskan	9	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan jaminan mutu dan keamanan pangan	Hasil registrasi dan uji mutu kurang terjaga dan kontinyu
Program Penanganan Kerawanan Pangan				
Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal.	16	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Intervensi hanya berupa stimulus pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain.	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi.
Kegiatan				
Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan	16	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	Fasilitasi Desa Rawan Pangan baru berupa stimulus pangan dan belum mencakup semua desa rawan pangan	Penanganan desa rawan pangan tidak mampu mengubah skala prioritas yang lebih tinggi.

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Rendahnya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan (Nilai Indeks di bawah 74,4)	12	Pangan tidak tersedia secara cukup, tidak merata di seluruh daerah, konsumsi masyarakat tidak memenuhi pola beragam bergizi seimbang dan aman	Tingginya gejala ekonomi dan sosial, tingginya inflasi, menurunnya kesehatan masyarakat	Memastikan ketersediaan stok pangan daerah, kemudahan akses, peningkatan mutu pangan, edukasi promosi pangan B2SA	Kepala Dinas	2024
Sasaran								
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Ketersediaan Energi	Stok dan pasokan komoditas pangan tidak merata di seluruh Jawa Tengah	8	Data stok pasokan di tiap wilayah tidak terpantau	Harga tinggi di beberapa daerah, konsumsi masyarakat tidak ideal (tidak B2SA)	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024
Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	12	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2024
Penanganan Daerah Rawan dan Gizi	Prosentase penanganan desa rawan pangan dan gizi di Jawa Tengah	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	16	Hanya mendapat intervensi berupa stimulus pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dg Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yg membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2024

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH	Masih kurang idealnya konsumsi masyarakat pada beberapa kelompok pangan	16	Kurangnya intervensi pemerintah thd pola konsumsi pangan B2SA	Menurunnya kesehatan masyarakat, tingginya kasus stunting	Edukasi pangan B2SA di semua elemen masyarakat melalui multi media	Kepala Dinas	2024
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	16	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Pengembangan pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2024
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Budaya pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi pada komoditas beras	20	Kurangnya alternatif pangan pengganti beras yang beredar di masyarakat	Angka konsumsi pada kelompok pangan padi-padian masih diatas angka ideal	Pengembangan pangan lokal serta Edukasi dan promosi pola pangan B2SA pada masyarakat	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2024
	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	Tidak tersedia cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	20	Keterbatasan anggaran, SDM pengelola cadangan pangan masyarakat dan sarana prasarana	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	2024
	Rata-Rata Ketercukupan Pangan	Masih minimnya alternatif pengganti beras di masyarakat.	16	Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	1. Upaya pengembangan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	Kerjasama pelaku usaha olahan pangan lokal sesuai kebutuhan	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	2024

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	Budaya konsumsi pangan masyarakat masih belum cukup beragam	16	Pengetahuan masyarakat tentang pola pangan B2SA belum tersosialisasi secara optimal	Masih terdapat Kabupaten dengan PPH dibawah 87	Pelaksanaan Edukasi dan Promosi B2SA kepada masyarakat dengan menyesuaikan permasalahan di lapangan	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2024
	PPH Kab / Kota > 87	Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi belum memadai	16	Kurangnya pengenalan olahan pangan lokal kepada masyarakat	Masih minimnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan makanan sehari-hari	Pelaksanaan Promosi B2SA berbasis pangan lokal kepada masyarakat	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2024
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal Yang Disusun	Informasi terkait potensi pangan lokal masih minim	9	Definisi Pangan lokal di Jawa Tengah masih terlalu luas dan kurang fokus	Strategi intervensi pengembangan pangan lokal tidak mendasarkan pada Pemetaan potensi pangan lokal	Perumusan definisi operasional pangan lokal Jawa Tengah	Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2024
	Prosentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Fluktuasi harga pangan tidak sesuai dengan acuan dalam regulasi terkait HPP/HAP/HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah	16	Produksi komoditas pangan bersifat musiman dan sifat komoditas yang mempunyai umur simpan relatif pendek	Kerugian bagi produsen saat harga jatuh dan keterjangkauan di tingkat konsumen saat terjadi kenaikan harga secara signifikan.	Subsidi harga di tingkat produsen maupun konsumen	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Cadangan pangan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan masyarakat rawan pangan	16	Keterbatasan anggaran dan sarprass, kurangnya pengawasan	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan di Jawa Tengah.	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarana prasarana	Bidang Ketersediaan Stabilisasi Pangan	2024
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan.	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan.	Surveilan dilakukan berbasis resiko pelaku usaha yang terindikasi tidak mematuhi regulasi jaminan mutu dan keamanan pangan	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1 tahun
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Kemanan Dan Mutu Pangan	Penyimpangan terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT di peredaran.	12	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT, edukasi dan pembinaan	Bidang Keamanan Pangan	2026
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	Pemanfaatan media sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih minim.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami keamanan dan mutu pangan	Edukasi keamanan dan mutu pangan kepada masyarakat melalui forum pertemuan serta pemanfaatan media sosial Instagram dan Youtube Dishanpan Jateng	Bidang Keamanan Pangan	2024
	Persentase Produk Pangan Segar Yang Teregistrasi Di Peredaran	Pelanggaran label PSAT	12	pelaku usaha tidak memahami ketentuan label PSAT	masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai ketentuan	Review hasil pengawasan dan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan	Bidang Keamanan Pangan	2026

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prosentase Kelompok / Pelaku Usaha Yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	Kelompok/ pelaku usaha belum menerapkan prinsip higiene sanitasi dalam penanganan pangan	12	Keterbatasan jumlah petugas dan narasumber, petugas tidak kompeten	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Sosialisasi, pelatihan pelaku usaha dan petugas secara online	Bidang Keamanan Pangan	2024
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Yang Disusun	Registrasi dan uji mutu pangan oleh Pelaku usaha masih karena regulasi yang mengharuskan	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan jaminan mutu dan keamanan pangan	Hasil registrasi dan uji mutu kurang terjaga dan kontinyu	Survailen terhadap registrasi dan hasil uji mutu yang telah dikeluarkan dari instansi	Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	2024
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	16	Intervensi hanya berupa stimulus pangan, dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi.	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan.	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2026
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan Dan Gizi	Rendahnya penanganan Desa Rawan Pangan	16	Fasilitasi Desa Rawan Pangan baru berupa stimulus pangan dan belum mencakup semua desa rawan pangan	Penanganan desa rawan pangan tidak mampu mengubah skala prioritas yang lebih tinggi.	Koordinasi dan sinergi program dan kegiatan lintas bidang dan lintas OPD.	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	2026